

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA ANGGARAN PADA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TANAH LAUT

**Eni Suasri**

Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Tanah Laut  
Jl. A. Yani Desa Panggung, Tanah Laut 70815  
eni@politala.ac.id

### Abstrak

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan komponen laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari pendapatan, belanja, surplus atau defisit, dan pembiayaan entitas pelaporan anggaran masing-masing dalam satu periode. Laporan realisasi anggaran bertujuan untuk mengetahui perbandingan atas anggaran yang didapat dengan realisasi anggaran yang pada akhir periode sehingga dapat dinilai kinerja anggaran institusi berjalan maksimal atau belum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektif atau tidak kinerja anggarannya pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut tahun 2017-2019. Hasil penelitian menggunakan metode analisis horizontal, dan analisis vertikal yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah pada bagian pendapatan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta belanja operasi dinyatakan tidak efektif dengan rata-rata nilai dibawah 60% yaitu 21% dan -10%, sedangkan belanja modal dinyatakan sangat efektif dengan rata-rata nilai diatas 100% yaitu 324%.

**Kata Kunci:** analisis kinerja anggaran, analisis horizontal dan analisis vertikal

### Abstract

*The budget realization report is a report that presents the components of the government's financial statements consisting of income, expenditure, surplus or deficit, and the financing of each budget reporting entity in one period. The budget realization report aims to find out the comparison of the budget that must be realized with the budget that will be obtained in the future, so that with this comparison it can be used as an evaluation material in financial performance. This study aims to determine the level of effectiveness in the use of budget funds at the Department of Animal Husbandry and Animal Health in Tanah Laut Regency in 2017-2019. The results of the study used the index number method, horizontal analysis, and vertical analysis which stated that local revenue in the regional retribution income section and other legitimate regional original revenues and operating expenditures was declared ineffective with an average value below 60%, namely 21%. and -10%, while capital expenditures were declared very effective with an average value above 100%, namely 324%. The reason for this was due to an increase or decrease based on internal factors, namely the transfer of budget funds and external factors due to the budget obtained based on the results of previous financial performance.*

**Keywords:** a budget performance analysis, number, horizontal analysis and vertical analysis

### 1. PENDAHULUAN

Pelaporan merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen. Dalam manajemen pelaporan merupakan fase terakhir yang digunakan atau dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi diri sendiri guna perbaikan manajemen instansi. Laporan keuangan adalah proses akhir yang dilakukan oleh instansi atau perusahaan dari serangkaian proses pencatatan data transaksi pada akhir periode. Laporan keuangan instansi disusun dan berfungsi sebagai kesimpulan dari pencatatan akhir yang dilakukan oleh instansi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Tujuan disusunnya laporan adalah untuk mewujudkan akuntabilitas atau pimpinan kolektif instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah

Anggaran yang didapat digunakan dalam kegiatan institusi dalam menjalankan program kerja maupun mensejahterakan masyarakat yang berasal dari presentasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengenai perancangan keuangan dimasa yang akan datang untuk membantu pemerintahan daerah

dalam pembangunan daerah melalui program kerja, alat distribusi, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilai kinerja pemerintah daerah dan motivasi. Anggaran memiliki peranan penting dalam sektor publik yaitu untuk membantu pemerintah dalam pembangunan daerah, meningkatkan kualitas sumber daya, memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas kebutuhannya, dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat atas penggunaan dana dalam kegiatan tertentu dengan mempertanggungjawabkan dana tersebut melalui laporan keuangan yang akurat sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pendapatan anggaran dana berpaku pada anggaran tahun sebelumnya sebagai bahan penilaian atau pengukuran anggaran berikutnya. Perencanaan anggaran digunakan dalam satu periode berikutnya sebagai bahan evaluasi dalam merubah sistem kinerja yang kurang efektif menjadi sistem kinerja yang lebih efektif lagi dalam membantu pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat.

Instansi mempertanggungjawabkan semua anggaran yang didapat sehingga pada akhir periode dapat dinilai kinerja instansi tersebut. Apakah efektif atau tidak dalam penggunaannya. Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan merupakan instansi pemerintah yang mana untuk kinerjanya harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sehingga harus akuntabel dan transparan.

Berdasarkan latar belakang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah instansi pemerintahan maka penelitian ini diangkat dalam rangka membantu publik atau masyarakat untuk mengetahui hasil kinerja instansi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sudah semestinya instansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran setiap periodenya harus di *publish* baik internal maupun eksternal (masyarakat) karena merupakan sektor publik.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Laporan Akuntabilitas Kinerja

#### 2.1.1 Pengertian Laporan Akuntabilitas Kinerja

Merujuk pada Perpres No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Institusi pemerintah maka yang disebut dengan Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD). Sedangkan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.07/UM.001/MPEK/2013 menyatakan pengertian laporan Akuntabilitas kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran, perwujudan akuntabilitas kinerja setiap unit kerja eselon I, satuan kerja Eselon II dan Subunit kerja Pelaksanaan Teknis.

Berdasarkan dari beberapa peraturan tentang laporan akuntabilitas kinerja, Laporan akuntabilitas kinerja adalah merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat atau amanah yang diterima instansi pemerintah.

#### 2.1.2 Tujuan dan Manfaat Laporan Akuntabilitas Kinerja

1. Mengenali kendala dan permasalahan yang dihadapi
2. Menilai efisiensi pencapaian hasil sumber daya dalam menghasilkan output
3. Menilai efektifitas pencapaian hasil terhadap rencana
4. Menilai apakah kualitas hasil telah memenuhi keinginan instansi
5. Menilai apakah pencapaian output dan outcome sesuai dengan waktu yang ditetapkan

#### 2.1.3 Akuntansi Sektor publik

Akuntansi Sektor Publik adalah suatu alat yang memberikan informasi bagi pemerintah, manajemen, dan masyarakat yang digunakan sebagai proses pengendalian

manajemen sampai dengan bahan evaluasi kinerja keuangan dengan tujuan menciptakan *good governance* dalam pengelolaan urusan publik (Ibrahim, 2017). Sedangkan pendapat lain yang menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu kegiatan pada bidang jasa dengan rangkaian penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah yang digunakan dalam pengambilan keputusan guna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Sinaga, 2017). Akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan peristiwa ekonomi dalam suatu organisasi yang sering dilakukan pada sektor publik seperti partai politik, masyarakat, sekolah, universitas dan lain-lain (Erlina, 2015). Akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah guna pengambilan keputusan ekonomi yang bermanfaat bagi pihak eksternal (Dwi Ratmono, 2015).

Dalam melaksanakan pekerjaan, organisasi dan lembaga publik selalu dituntut agar pengelolaan biaya sosial dan ekonomi bisa lebih efisien. Jika tuntutan pertanggungjawaban publik oleh berbagai lembaga publik menguat, akuntansi sektor publik akan diakui sebagai ilmu untuk mengelola keuangan publik. Bisa dibilang akuntansi untuk sektor publik ini digunakan untuk transparansi kepada publik untuk memenuhi hak-hak publik.

Akuntansi sektor publik memiliki peran akuntansi dalam organisasi publik seperti:

1. Pengelolaan Keuangan Negara

Pengelolaan Keuangan Negara yang memiliki peran penting dalam akuntansi sektor publik khususnya dalam peran akuntansi organisasi publik dengan meliputi manajemen keuangan sektor publik dan akuntansi manajemen sektor publik. Pengelolaan keuangan Negara digunakan sebagai alat pengatur untuk mencapai target sesuai dengan tujuan, meningkatkan kualitas yang dimiliki, dan mengatur maupun mengendalikan resiko dengan baik.

2. Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan adalah suatu sumber informasi dalam penyajian maupun penyusunan laporan keuangan dalam sektor publik. Pelaporan keuangan bisa disampaikan kepada pihak yang berkepentingan seperti manajemen atau publik, penyampaian tersebut bisa dilakukan melalui media sosial yang terkait ataupun papan pengumuman atas penggunaan keuangan baik selama satu periode atau triwulan. Pelaporan keuangan disajikan dalam laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

3. Pemeriksaan

Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui atas kegunaan dana selama satu periode yang telah diberikan oleh pemerintah dengan menyesuaikan program kerja ataupun pengeluaran yang digunakan agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran pemerintah serta sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam pemberian anggaran dana kepada instansi terkait atas kinerja keuangan.

4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik

Perwujudan tata kelola pemerintah yang baik digunakan untuk mewujudkan maupun menerapkan prinsip tata kelola organisasi yang baik atau *good governance*. Perwujudan tersebut diaplikasikan dengan prinsip yang ada seperti transparansi, akuntabilitas, reponsivitas, independensi, dan kewajaran.

Jadi dapat disimpulkan dengan pendapat yang berbeda bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu informasi yang menyajikan laporan keuangan dengan berbentuk angka yang akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, manajemen, dan masyarakat dengan tujuan sebagai bahan pengendalian manajemen publik sampai dengan resiko yang terjadi serta sebagai bahan pengambilan keputusan kedepannya dengan memperhatikan pengelolaan kinerja keuangan selama satu periode.

#### 2.1.4 Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, dinyatakan dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang (Siregar, 2017). Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa anggaran adalah instrument perencanaan dan pengendalian manajemen yang berupa dokumen publik yang dapat diakses oleh publik untuk diketahui, diberi masukan, dikritisi, dan diperdebatkan (Mahmudi, 2016). Proses penyusunan anggaran ada beberapa tahap seperti:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu tahap pertama dalam penyusunan anggaran khususnya sektor publik dengan melakukan beberapa pendekatan seperti *top down budget planning*, *bottom up*, atau kombinasi antar *top down budget planning* dan *bottom up* dalam penetapan anggaran yang telah dilakukan.

2. Pengesahan (Rafikasi)

Pengesahan (Rafikasi) adalah tahap tentang pembahasan dan pengesahan yang dilakukan oleh dewan legislatif sebagai pelaksanaan hak budget dikarenakan pengesahan ini harus dapat persetujuan dari dewan legislatif agar anggaran yang diusulkan terlaksana.

3. Pelaksanaan

Anggaran dilaksanakan ketika mendapatkan persetujuan dewan legeslatif dengan tahap mengajukan permintaan pencairan dana berdasarkan dana yang telah dianggarkan sebelumnya.

4. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Laporan yang disajikan tentang anggaran yang telah digunakan selama satu periode berlangsung dan dipertanggungjawabkan atas penggunaan anggaran tersebut yang akan disampaikan oleh dewan legislatif dan masyarakat.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah suatu laporan yang disusun secara terinci atas dana yang akan digunakan selama satu periode berjalan untuk menjalankan program kerja dan mensejahterakan masyarakat dengan melalui tahap dari perenanaan, pengesahan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban untuk mendapatkan anggaran yang telah disusun dan disetujui oleh dewan legeslatif

#### 2.1.5 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang disajikan secara perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode laporan (Suwanda & Hendri Santoso, 2015). Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen atas laporan keuangan pemerintah yang menyajikan tentang realisasi dan anggaran yang disajikan secara bersandingan dalam satu periode dengan terdiri dari pendapatan, belanja, surplus atau defisit, dan pembiayaan entitas pelaporan anggaran masing-masing (Ratmono & Sholihin, 2017). Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan komponen laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari pendapatan, belanja, *surplus* atau defisit, dan pembiayaan entitas pelaporan anggaran masing-masing dalam satu periode.

#### 2.1.7 Analisis Horizontal

Analisis Horizontal adalah suatu perbandingan antara dua tahun laporan keuangan atau lebih yang disajikan secara komparatif (Samryn, 2012). Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa analisis horizontal adalah analisis yang dilakukan

dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode dengan tujuan mengetahui perkembangan perusahaan dari satu periode ke periode yang lain (Rustamunadi & Dewi Juni Andini, 2018). Analisis Horizontal bertujuan untuk mengetahui peningkatan maupun penurunan yang terjadi selama satu periode guna memperbaiki kinerja keuangan yang perlu diperbaiki kedepannya, dalam analisis horizontal dapat diperoleh dengan cara membandingkan tahun sebelumnya dan tahun yang digunakan melalui jalan pembagian. Perbandingan tersebut mempunyai teknik dalam membandingkan laporan keuangan seperti membandingkan jumlah keuangan, kenaikan atau penurunan dalam rupiah, kenaikan dan penurunan dalam persentase, perbandingan menggunakan rasio, dan persentase dari total. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan bahwa analisis horizontal adalah analisis yang membandingkan suatu periode dengan periode lain yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan kinerja pada periode terkait.

### **2.1.8 Analisis Vertikal**

Analisis Vertikal adalah Analisis perbandingan yang digunakan untuk menghitung ukuran besarnya suatu akun atau item di laporan keuangan terhadap yang lainnya (Setiawan, 2016). Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa analisis vertikal adalah metode dengan cara menganalisis laporan keuangan pada satu periode tertentu dengan membandingkan antara pos satu dengan pos yang lain pada laporan keuangan yang sama (Tinambunan, 2017). Analisis vertikal juga disebut dengan analisis statis, dimana cara perhitungan atas analisis vertikal menggunakan perbandingan antara komponen atau akun yang gunakan dengan jumlah komponen tersebut melalui jalan pembagian untuk mengetahui nilai persentase. Perbandingan tersebut menggunakan laporan keuangan dengan teknik membandingkan nilai rupiah maupun membandingkan peningkatan dan penurunan dalam rupiah. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dinyatakan bahwa analisis vertikal adalah analisis yang membandingkan pos satu dengan pos yang lain dengan laporan keuangan yang sama terhadap periode bersangkutan dengan menunjukkan nilai persentase.

## **3. METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Deskripsi Objek penelitian**

Objek penelitian ini adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut yang didirikan tahun 1970 an, dimana dinas tersebut berhubungan dengan kehewanian yaitu Dinas Kehewanian dan diganti menjadi Dinas Peternakan pada tahun 1980. Kemudian pada tahun 2017 diganti menjadi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 84 tahun 2016. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan serta sebagai tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah seperti perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan, serta evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut bertempat di Jalan Datu Insad, Angsau, Kecamatan Pelaihari. Sedangkan lokasi pasar hewan berada di Jalan A. Yani, Kelurahan Saranghalang. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh Ir. Suharyo sebagai kepala dinas. Ir. Suharyo menjalankan tugas sebagai kepala dinas dibantu oleh sekretariat dan bidang-bidang teknis.

### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berjenis kuantitatif dikarenakan data yang sudah disajikan langsung dari Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Tanah laut dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mencakup keseluruhan mengenai pendapatan asli daerah , belanja operasi dan belanja modal.

### 3.3 Periode Waktu Penelitian

Periode waktu penelitian ini digunakan dari tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2019.

### 3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini untuk membantu pengolahan data, maka penulis menggunakan teknik analisis data yaitu: analisis horizontal dan vertikal yang mana dengan metode ini maka perusahaan maupun instansi dapat mengetahui hasil perkembangan laporan setiap periode maupun beberapa periode yang telah berjalan serta dapat menganalisa apakah penerimaan dan penggunaan dana yang telah didapat sudah efektif untuk kinerja perusahaan atau instansi.

#### 1. Analisis Horizontal

Analisis perbandingan atas laporan keuangan untuk beberapa periode yang menunjukkan perkembangan pada periode tersebut. Rumus yang digunakan sebagai berikut :

Jumlah Perubahan = Saldo komponen berjalan – saldo komponen sebelumnya

$$\text{Persentase perubahan} = \frac{\text{Jumlah Perubahan}}{\text{Saldo Komponen Sebelumnya}} \times 100\%$$

Keterangan :

Komponen Sebelumnya = Akun yang digunakan periode sebelumnya

Komponen Berjalan = Akun yang digunakan periode sekarang

#### 2. Analisis Vertikal

Analisis perbandingan atas laporan keuangan dalam satu periode yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan selama satu periode tersebut (Kasmir, 2017).

Rumus yang digunakan dalam analisis vertikal yaitu :

$$\text{Persentase per komponen} = \frac{\text{Masing-masing saldo komponen}}{\text{Total kelompok komponen}} \times 100\%$$

Keterangan :

Komponen = Akun yang digunakan

## 4. PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Perhitungan Menggunakan Analisa Horizontal

Tahun	Pendapatan Retribusi Daerah	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Belanja Operasi	Belanja Modal
2017	-13%	15%	-2%	-93%
2018	-16%	-119%	-20%	-92%
2019	3%	29%	54%	3396%
Rata-rata	-9%	-25%	11%	1070%
Kinerja Keuangan	Tidak Efekif	Tidak Efekif	Tidak Efekif	Sangat Efekif

(Sumber : Data Diolah Penulis Tahun 2021)

#### 4.2 Hasil Perhitungan Menggunakan Analisa vertikal

Tahun	Pendapatan Retribusi Daerah	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Belanja Operasi	Belanja Modal
2017	86%	14%	97%	3%
2018	92%	8%	100%	1%
2019	90%	10%	94%	6%
Rata-rata	89%	11%	97%	3%
Kinerja Keuangan	Cukup Efektif	Tidak Efektif	Efektif	Tidak Efektif

(Sumber : Data Diolah Penulis tahun 2021)

Berdasarkan tabel 4.1 dan 4.2 dapat dijelaskan bahwa perhitungan analisis horizontal dan perhitungan analisis vertikal menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Hewan tidak efektif menggunakan perhitungan analisis horizontal dan beberapa unit efektif dengan perhitungan menggunakan analisis vertikal.

1. Tahun 2017, Pendapatan retribusi daerah -13 %, lain-lain pendapatan asli daerah -15%, belanja operasi -2%, belanja modal -93% dengan analisis horizontal tidak efektif dan pendapatan asli daerah 86%, lain-lain pendapatan asli daerah 14%, belanja modal 97% dan belanja modal 3% dengan analisis vertikal cukup efektif dan efektif pada pendapatan retribusi dan belanja operasi karena menunjukkan persentase diatas penilaian standar.
2. Tahun 2018, Pendapatan retribusi daerah -16 %, lain-lain pendapatan asli daerah 119%, belanja operasi -20%, belanja modal -92% dengan analisis horizontal tidak efektif dan pendapatan asli daerah 92%, lain-lain pendapatan asli daerah 8%, belanja modal 100% dan belanja modal 1% dengan analisis vertikal cukup efektif dan efektif pada pendapatan retribusi dan belanja operasi karena menunjukkan persentase diatas nilai standar.
3. Tahun 2019, Pendapatan retribusi daerah 39 %, lain-lain pendapatan asli daerah 29%, belanja operasi 54%, belanja modal 3396% dengan analisis horizontal tidak efektif kecuali belanja modal sangat efektif karena persentasi diatas nilai standar dan pendapatan asli daerah 90%, lain-lain pendapatan asli daerah 10%, belanja modal 94% dan belanja modal 6% dengan analisis vertikal cukup efektif dan efektif pada pendapatan retribusi dan belanja operasi karena menunjukkan persentase diatas nilai standar.

#### 5. KESIMPULAN

Perhitungan analisis horizontal dan analisis vertikal pada laporan kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Hewan Kabupaten Tanah Laut selama tiga tahun, rata-rata menunjukkan angka presentasi dibawah nilai standar dan hanya pada belanja modal yang menunjukkan sangat efektif untuk kinerjanya, sedangkan dengan perhitungan analisis vertikal pada pendapatan retribusi cukup efektif dan belanja operasi menunjukkan presentase diatas nilai standar.

#### 6. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, perhitungan analisis horizontal bisa digunakan dalam penilaian kinerja institusi, karena dengan analisis ini kinerja perusahaan menunjukkan sudah efektif dibandingkan dengan menggunakan analisis horizontal. Akan tetapi penulis menyarankan kepada penulis selanjutnya untuk menggunakan metode yang lain sehingga bisa diketahui apakah dengan metode analisis yang lain bis lebih efektif lagi.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten tanah laut diharapkan tetap memperhatikan dalam penggunaan anggaran dana agar selama penggunaan anggaran dana tersebut dapat dinilai dengan efektif baik dalam hal perhitungan yang terkait dengan pendapatan maupun belanja yang diserap selama satu periode sehingga bisa menghasilkan hasil analisis yang efektif diseluruh metode yang digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asoka, R. (2019). Analisis Efektifitas Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Musi Bayuasin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 2.
- Manopo, N., Debby Ch Rotinsulu, & Sri Murni. (2019). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 2.
- Nusarifa, S., & Putri Irmawati. (2018). Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1.
- Oktavina, D. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Rangka Otonomi Daerah. *Jurusan Ekonomi Pembangunan*.
- Rondonuwu, R. H., Jantje J. Tinangon, & Novi Budiarmo. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 3.
- Rustamunadi, & Dewi Juni Andini. (2018). Analisis Rasio Laporan Keuangan Model Horizontal dan Vertikal PT Sun Life Financial Indonesia Syariah Tahun 2013-2017. 4.
- TaTinambunan, A. P. (2017). Analisis Vertikal dan Horizontal Terhadap Laporan Keuangan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.
- Waney, C. K., David P.E Saerang, & Stanley W. Alexander. (2018). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Di Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.

## Biodata Penulis



Tanah Laut

**Eni Suasri**, lahir di Benua Tengah, 10 Maret 1977. Menempuh pendidikan S1 Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin dan lulus tahun 2004 kemudian melanjutkan S2 Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 penulis berprofesi sebagai staff keuangan di Politeknik Negeri Tanah Laut. Dan sejak tahun 2018 sampai sekarang penulis kemudian menjadi dosen tetap di Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri